

MORAL EKONOMI DAN BELENGGU KEMISKINAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BELU¹

Robert Siburian

ABSTRACT

Tulisan ini menjelaskan bagaimana masyarakat lokal di daerah Belu hidup dalam kemiskinan dan mengapa ekonomi subsisten menjadi moral ekonomi pada masyarakat lokal terutama petani. Kondisi kemiskinan adalah masalah siapa dalam proses produksi hanya menemukan ekonomi subsisten menjadi itu moral ekonomi untuk mereka. Ekonomi subsisten menjadi moral ekonomi, dimana orang-orang dalam melakukan proses produksi mempunyai keterbatasan untuk melakukan sesuatu yang baru. Melakukan sesuatu hal yang baru dianggap dapat membahayakan mereka dalam mendapatkan nafkah. Sementara itu resiko selalu dihindari dan keamanan menjadi prioritas, selain adanya moral ekonomi seperti itu, keterbatasan yang di punyai oleh Daerah Belu adalah musim kemarau yang lebih panjang daripada musim hujan, sehingga kondisi ini mempengaruhi produksi.

Kata kunci: Moral Ekonomi, Ekonomi Subsisten, dan Kemiskinan

I. PENGANTAR

Kabupaten Belu khususnya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada umumnya termasuk daerah miskin di Indonesia. Hal itu didasarkan pada rendahnya tingkat pendapatan penduduk per kapita, bahkan jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Badan dunia tersebut menetapkan apabila penduduk suatu negara hanya berpendapatan sebesar atau kurang dari US\$ 2 per hari dan setara dengan US\$ 600 per tahun, maka ia dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ketidakmampuan masyarakat untuk mencapai tingkat pendapatan minimal yang digariskan oleh PBB itu akibat rendahnya tingkat produktivitas per kapita, sebagai muara dari rendahnya tingkat kesuburan tanah ditambah musim kemarau yang relatif lebih lama sepanjang tahunnya sehingga kekeringan terjadi di mana-mana. Sungai pun banyak yang kering di musim kemarau tersebut. Dalam Haba (2007: 97) menyebutkan bahwa di Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Belu, hari hujan dalam setahun hanya 42 hari saja, dengan total curah hujan berkisar 756 milimeter saja. Kendala kekeringan ini belum dapat diatasi oleh masyarakat petani.

Pendapatan per kapita yang relatif rendah itu terukur dari kinerja pendapatan per kapita dari Provinsi NTT. Pada tahun 2001 misalnya, sebagaimana dikemukakan oleh Gaspersz dan Foeny (2003), kinerja pendapatan per kapita penduduk yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan tahun 1993 dibagi jumlah penduduk tengah tahun, hasilnya sebesar Rp 732.100 per tahun atau Rp 61.008 per bulan. Sementara berdasarkan harga berlaku pada tahun 2001, pendapatan per kapita penduduk NTT adalah sebesar Rp 1.811.696 per tahun atau Rp 150.975 per bulan. Dengan menggunakan nilai kurs US\$ 1 = Rp 9.000 (rata-rata nilai kurs pada tahun 2001), pendapatan per kapita NTT pada tahun 2001 atas dasar harga berlaku setara dengan US\$ 200. Nilai itu hanya sekitar 33,33% dari standar minimal batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh PBB yang jumlahnya sebesar US \$ 600 per tahun itu.

Kondisi di tingkat Provinsi NTT itu hampir sama terjadi juga di tingkat Kabupaten Belu. Data Badan Pusat Statistik (2006: 392) mencatat bahwa tingkat pendapatan penduduk per kapita pada tahun 2005 hanya Rp 2.526.953 atas dasar harga berlaku. Apabila pengaruh inflasi diabaikan, tingkat pendapatan per kapita

berdasarkan harga konstan 2000 berjumlah Rp 1.661.551, atau ekuivalen dengan US\$ 280,77 berdasarkan harga berlaku dan sekitar US\$ 184,61 menurut harga konstan jika dikonversikan dengan dolar Amerika Serikat dengan asumsi US\$ 1 = Rp 9.000. Bila angka itu dibandingkan dengan standard PBB, persentasenya baru mencapai 46,79% berdasarkan harga berlaku dan 30,76% berdasarkan harga konstan. Relevan dengan tingkat pendapatan yang begitu rendah, sejalan pula dengan tingkat kerawanan pangan yang ada di Kabupaten Belu. Berdasarkan data Pemerintah NTT, keadaan 14 Juni 2005, Kabupaten Belu memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi pula. Dari 67 desa yang ada di Kabupaten Belu, hanya 2 desa dengan jumlah penduduk 1.001 jiwa yang relatif aman dari resiko rawan pangan, sedangkan 65 desa lain beresiko terjadinya rawan pangan dengan berbagai tingkatan, sebagai berikut. Sebanyak 20 desa dengan 31.503 jiwa resiko ringan, 16 desa dengan jumlah penduduk 21.675 jiwa resiko sedang, dan 29 desa dengan penduduk 54.401 resiko tinggi (Pemerintahan Provinsi NTT, 2005). Apabila kemiskinan yang dialami oleh penduduk tidak dapat diatasi maka kerawanan pangan pun akan selalu mewarnai kehidupan mereka.

Selama periode 1996-1999, jumlah penduduk miskin (ukuran BPS=Badan Pusat Statistik) di Propinsi NTT mengalami kenaikan yaitu 1.395.100 jiwa di tahun 1996 menjadi sebesar 1.779.000 jiwa atau 46,73% di tahun 1999. Persentase penduduk miskin di perdesaan relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 49,39% (1.632.700 jiwa) pada tahun 1999, kondisi itu jauh lebih besar dari perkotaan yang hanya sebesar 29,20% (146.300 jiwa). Bila melihat perkembangannya selama periode 1996-1999, jumlah absolut maupun relatif penduduk miskin di daerah perkotaan maupun perdesaan, cenderung mengalami peningkatan (Gaspersz dan Foenay, 2003).

Rendahnya tingkat pendapatan penduduk perkapita mengakibatkan masyarakat banyak yang hidup pada tingkat subsisten. Akibatnya, penduduk kurang berani melakukan terobosan-terobosan baru pada tingkat produktivitas, karena tindakan itu dapat membahayakan kehidupan subsisten mereka seandainya

terobosan yang dilakukan itu tidak berhasil. Terobosan baru yang tidak berhasil berdampak pada terancamnya pemenuhan kebutuhan hidup subsisten. Mereka tidak mempunyai sumber daya ekonomi lain yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kemantapan dalam kehidupan subsisten menjadi tujuan dari setiap proses produksi yang dilakukan. Pola hidup yang demikian menjadi moral ekonomi masyarakat dalam keseharian ketika melakukan aktivitasnya, yang mengakibatkan setiap introduksi teknologi yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kurang berhasil.

Terkait dengan produktivitas masyarakat yang sekedar untuk memenuhi kebutuhan subsisten, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan; bagaimana pola hidup subsisten menjadi moral ekonomi petani, dan mengapa kemiskinan membelenggu masyarakat sehingga menyulitkan masyarakat petani keluar dari kemiskinan itu. Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pembahasan dalam tulisan ini dibagi menjadi empat; 1) menjelaskan bagaimana ekonomi subsisten menjadi moral ekonomi, 2) menguraikan kondisi masyarakat dan tingkat pendapatan mereka, 3) menjelaskan produktivitas dan budaya kerja pada masyarakat, dan 4) menjelaskan apa yang menjadi faktor penghambat sehingga masyarakat di Kabupaten Belu relatif sulit berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahterannya. Tulisan ini diakhiri dengan suatu kesimpulan.

II. EKONOMI SUBSISTEN SEBAGAI MORAL EKONOMI

Salah satu ciri khas keluarga yang hidup dengan tingkat ekonomi subsisten adalah menyatunya unit produksi dengan unit konsumsi. Artinya, apa yang diproduksi oleh rumah tangga merupakan sesuatu yang langsung untuk mereka konsumsi, atau paling tidak hasil produksi itu lebih banyak dikonsumsi sendiri. Walaupun ada komoditi yang diperjualbelikan, tindakan itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebutuhan lain yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Namun yang jelas, kebutuhan lain itu masih bagian dari komoditi yang mendukung kehidupan subsisten tadi.

Komoditi yang harus dibeli itu antara lain; garam, sabun, minyak goreng dan rokok. Seandainya komoditi itu tidak dapat dibeli karena hasil produksi pertanian tidak dapat dijual, maka yang mungkin dilakukan oleh mereka antara lain memasak tanpa menggunakan minyak goreng ataupun mandi tanpa memakai sabun.

Dengan fenomena kehidupan yang dikemukakan di atas, maka ciri-ciri kelompok masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi subsisten adalah sebagai berikut. *Pertama*, hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan apakah itu petani, nelayan dan pedagang kecil tidak bertujuan untuk komersialisasi. Mereka dalam melakukan proses produksi tidak untuk orientasi pasar, apalagi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sebagaimana yang ada dalam prinsip ekonomi. *Kedua*, tujuan mereka dalam proses produksi sekedar untuk bertahan hidup pada level yang paling minimum, yaitu ketercukupan akan kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar (Rogers, 1968).

Dengan ciri-ciri itu, upaya untuk menambah sumber pendapatan yang sering tidak cukup apabila hanya mengandalkan hasil pertanian, kelompok masyarakat dengan ekonomi subsisten ini biasanya menerima pekerjaan-pekerjaan lain dengan upah yang relatif kecil, seperti menjadi buruh tani, kuli bangunan dan termasuk juga mempekerjakan anak-anak yang masih di bawah umur. Pengamatan penulis di Kabupaten Belu menunjukkan bahwa anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah, dalam kenyataannya mereka sudah harus ikut mencari uang untuk memenuhi atau menambah pemenuhan kebutuhan keluarga. Anak-anak yang masih dalam usia sekolah ini menjadi penjual sayur-sayuran, daging babi dan ikan laut. Mereka ini berkeliling keluar-masuk kampung sekedar untuk menjajakan dagangannya. Baik sayur-sayuran, daging babi, ataupun ikan laut, jumlahnya tidak begitu banyak dan beratnya tidak lebih dari 2 (dua) kilogram, namun uang yang diperoleh itu sangat berarti dalam menopang ekonomi keluarga. Bagi kelompok masyarakat ekonomi subsisten seperti petani, melibatkan anak-anak untuk ikut bekerja di sawah dan ladang merupakan hal yang umum dijumpai, tidak saja

di Kabupaten Belu, juga di berbagai tempat di Indonesia ini.

Pada kelompok masyarakat ekonomi subsisten, mereka lebih mendahulukan selamat. Petani misalnya, proses produksi yang dilakukan lebih mengutamakan ketercukupan akan kebutuhan hidup pada saat itu. Kemantapan dalam kehidupan subsisten ini mengakibatkan petani subsisten selalu menghindari dari segala bentuk resiko sekecil apapun ketika mereka melakukan proses produksi. Oleh karena resiko identik dengan kerugian, sehingga apabila kerugian itu yang terjadi ditandai berkurangnya hasil produksi bahkan tidak jarang ada yang sampai gagal memberikan hasil sama sekali akan mengurangi hasil produksi dari yang biasanya mereka peroleh. Adanya resiko seperti itu berakibat turunnya kemantapan tingkat subsisten tadi. Dampak selanjutnya adalah kehidupan diri dan anggota keluarga menjadi taruhannya. Sebagai kelompok masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi subsisten, mereka tidak mempunyai sumber daya ekonomi lain yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat dari suatu kegagalan atau kerugian adalah begitu rupa, karena itu petani subsisten lebih mengutamakan apa yang dianggap aman dan dapat diandalkan daripada keuntungan yang dapat diperoleh dalam jangka panjang (Scott 1994: 19).

Bentuk perilaku yang berorientasi pada kemantapan hidup subsisten, mengakibatkan petani subsisten relatif menolak bentuk-bentuk intervensi terhadap pola produksi pertanian yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, terlebih kalau dalam penerapan pengetahuan baru itu mereka masih diharuskan menambah biaya produksi dari yang biasa dikeluarkan selama terlibat dalam proses produksi. Sebab, intervensi itu merupakan bentuk perubahan terhadap pola produksi yang mereka kenal selama ini, yang tentu saja menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu yang dapat berdampak pada terganggunya kemantapan dalam hal pemenuhan kebutuhan subsisten tadi. Konsekuensi negatif dari penerapan teknologi baru merupakan hal yang sangat ditakutkan oleh petani subsisten. Oleh karena petani subsisten selalu menghindari resiko yang mungkin terjadi, maka tingkat produktivitas dari ekonomi subsisten jarang meningkat, sebab

salah satu cara meningkatkan hasil produksi itu adalah kesediaan untuk merubah pola produksi yang didasarkan pada pengalaman dan kebiasaan terdahulu menjadi pola produksi yang berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan.

Menghindari keterancaman hidup akibat kegagalan yang tidak dapat dihindari oleh ekonomi subsisten di dalam proses produksi, ataupun akibat kebutuhan yang bertambah dari yang diperkirakan sebelumnya—misalnya kebutuhan untuk berobat karena sakit, turut berpartisipasi memberikan sumbangan sekeadarnya kepada kerabat atau tetangga yang tengah melaksanakan hajatan, biasanya petani subsisten meminta “bantuan” pinjaman dari pemilik modal. Apabila pola menyelamatkan diri ini sering dilakukan, hal itu menjadi pola hubungan ‘patron-klien’ yang membuat petani subsisten (klien) semakin bergantung kepada pemilik modal (patron). Keterikatan yang demikian mengakibatkan petani subsisten tidak mempunyai pilihan lain dalam memasarkan hasil pertaniannya, misalnya beralih kepada pemilik modal lain yang bersedia membeli hasil pertanian itu dengan harga yang lebih tinggi. Seandainya ia menjual hasil pertaniannya ke orang lain, ada kekhawatiran kalau suatu waktu petani meminta bantuan dari pemilik modal yang sudah “ditinggalkan” itu tidak akan memenuhinya. Kalau itu yang terjadi maka ia akan mengalami kesulitan yang lebih parah lagi. Loyalitas seperti ini sering terjadi pada klien walaupun sebenarnya patron tidak meminta loyalitas yang dimaksud. Loyalitas yang demikian, merujuk kepada tulisan Lipton (1969) yang dikutip oleh Scott (1994: 8) dimaknai sebagai bentuk-bentuk asuransi yang terselubung.

Fenomena yang memunculkan perbedaan antara petani subsisten dengan petani besar (*farmer*) adalah juga menyangkut apakah petani itu berani mengambil resiko atau justru menghindari resiko walaupun keuntungan yang dapat diperoleh begitu besar. Petani subsisten selalu melihat bahwa segala sesuatu yang akan mereka kerjakan itu dari sisi ketidakpastian (*uncertainty*) dan menghindari resiko. Sebaliknya bagi petani besar, apa yang ingin mereka kerjakan lebih mengadopsi resiko, sehingga dengan kondisi cuaca yang tidak menentu sekalipun kegiatan pertanian tetap dilaksanakan (Cancian, 1984). Petani yang selalu

menghindari resiko lebih mengutamakan selamat kendati hasil yang diperoleh itu berada pada tingkat minimal, sehingga di kalangan mereka inovasi di bidang pertanian tidak berkembang. Salah satu dampak dari inovasi yang selalu dihindari oleh petani kecil adalah kegagalan yang identik dengan resiko ataupun kerugian. Apabila kegagalan itu yang terjadi maka petani akan kehilangan segala-galanya, dan hal itu menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup keluarganya. Mereka tidak lagi mempunyai sumber pendapatan lain seperti yang dimiliki oleh petani-petani besar. Kecenderungan petani kecil bersedia mengadopsi inovasi baru itu kalau petani lain sudah ada yang berhasil mencobanya, karena dengan demikian resiko kegagalan dapat diminimalkan

III. KONDISI MASYARAKAT DAN TINGKAT PENDAPATAN

Data statistik 2006 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 248.901 jiwa dari total penduduk 394.668 jiwa. Berarti persentase penduduk miskin di daerah itu sekitar 63% lebih, berada dalam 54.190 rumah tangga, dan menyebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu, meliputi Kecamatan Malaka Barat, Rinhat, Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, Sasita Mean, Malaka Timur, Laen Manen, Raimanuk, Kobalima, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat dan Lamaknen. Kecamatan Kota Atambua selain sebagai pusat pemerintahan, juga berkembang menjadi pusat perdagangan, jasa dan pendidikan di Kabupaten Belu. Kendati demikian, Kecamatan Kota Atambua merupakan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbesar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain, dengan penduduk miskin mencapai 34.856 jiwa dari keseluruhan penduduk berjumlah 73.794 jiwa (BPS, 2007). Selengkapnya, lihat tabel berikut.

Kehidupan penduduk di Kabupaten Belu masih bertumpu pada sektor agraris, dengan produktivitas pertanian yang tergolong rendah. Oleh karena itu, pada tahun 2005 misalnya, kontribusi sektor pertanian kepada PDRB Kabupaten Belu adalah 35,77% berdasarkan harga berlaku atau 40,09% berdasarkan harga konstan tahun 2000. Selain itu, sektor yang

memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB adalah sektor perdagangan restoran, dan hotel 15,92%, serta jasa-jasa 24,69 %. Sementara sektor-sektor lain,² kotribusinya kepada PDRB hanya di bawah 10% berdasarkan harga berlaku (BPS, 2005).

Tabel: Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Belu Berdasarkan Kecamatan Tahun 2006

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin
1	Malaka Barat	23.150	16.018
2	Rinhat	15.363	11.510
3	Wewiku	19.477	14.009
4	Weliman	20.728	13.126
5	Malaka Tengah	37.796	25.614
6	Sasita Mean	23.742	19.510
7	Malaka Timur	11.103	8.836
8	Laen Manen	15.998	9.678
9	Raimanuk	14.731	13.113
10	Kobalima	25.175	8.614
11	Tasifeto Barat	29.450	15.854
12	Kakuluk Mesak	16.597	11.826
13	Tasifeto Timur	21.949	15.834
14	Raihat	16.128	11.848
15	Lasiolat	7.761	4.838
16	Lamaknen	21.726	13.817
17	Kota Atambua	73.794	34.856
Kabupaten Belu		394.668	248.901

Sumber: Belu Dalam Angka, BPS Kabupaten Atambua, 2007

Tingginya kontribusi sektor pertanian pada PDRB, tidak berarti sektor ini telah dikelola secara modern ataupun berdasarkan ekonomi rasional. Diperolehnya kontribusi dari sektor pertanian yang begitu besar karena jumlah penduduk yang melakukan aktivitas di sektor itu lebih banyak dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Padahal, kalau tingkat produktivitas itu dihitung berdasarkan penduduk yang bergerak di sektor pertanian, tampak bahwa produktivitas penduduk yang bergerak di sektor pertanian itu relatif kecil.

Tingkat pendapatan penduduk perkapita tahun 2005 adalah Rp 2.572.520 pada harga berlaku dan Rp 1.661.550 pada harga konstan tahun 2000. Tingkat pendapatan penduduk perkapita di Kabupaten Belu itu tergolong rendah. Hal itu mengakibatkan Kabupaten Belu dengan menggunakan standard PBB termasuk dalam kategori daerah miskin karena pendapatan itu masih jauh di bawah US\$ 2 / hari atau US\$ 600 / tahun, yang kalau

dikonversikan ke rupiah mencapai Rp 5.400.000 / tahun (dengan asumsi US\$ 1 ekuivalen dengan Rp 9.000).

Kemiskinan penduduk di Kabupaten Belu juga dapat ditelusuri dari tingkat pengeluaran masing-masing rumah tangga. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, yang dikutip oleh BPS (2006: 89) mencatat bahwa tingkat pengeluaran rumah tangga masih rendah. Pengeluaran rumah tangga sampai Rp 149.999 mencapai 70,9%. Kalau rata-rata tiap rumah tangga terdiri atas 5 anggota keluarga, maka tingkat pengeluaran per kapita hanya Rp 29.999 sebulan.

Kemiskinan yang dialami penduduk di Kabupaten Belu terutama mereka yang bergerak di bidang pertanian tergambar juga dari perilaku bertani dan kehidupan lainnya. Mereka kurang memiliki motivasi dan inisiatif untuk berusaha, kurang mampu menangkap peluang ekonomi yang tersedia, baik dalam sistem sosial maupun di luar sistem sosial setempat, dan diperparah oleh kondisi sumberdaya alam yang kurang produktif. Perilaku petani yang didominasi oleh penduduk lokal itu berbeda dengan perilaku ekonomi pendatang (tidak termasuk eks pengungsi Timor Timur). Perilaku yang berbeda itu mengakibatkan rata-rata kehidupan ekonomi pendatang ini berada di atas kehidupan ekonomi penduduk lokal. Pendatang dalam kegiatan ekonominya, selain bersedia bekerja keras juga memiliki kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang relatif tinggi. Mereka mampu menangkap peluang ekonomi yang ada, misalnya penggunaan sepeda motor yang mereka kredit tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi modal untuk berusaha. Sepeda motor tidak dipakai sekedar untuk meningkatkan status sosial, tetapi mereka memodifikasinya sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai sarana usaha untuk menjual hasil pertanian berkeliling keluar-masuk desa. Artinya, hasil dari penggunaan sepeda motor selain dapat digunakan untuk mengangsur pembayaran kredit, juga memberikan nilai tambah bagi kehidupan keluarga (Siburian, 2007).

Kemiskinan yang membelenggu penduduk lokal mengakibatkan mereka banyak yang menjadi penerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk Program Raskin (beras bagi keluarga

miskin) maupun BLT (bantuan langsung tunai). Sebagai contoh, per 31 Mei 2007 rumah tangga miskin di Kecamatan Kota Atambua sebanyak 7.447 kepala keluarga dari 13.308 kepala keluarga yang ada. Angka itu lebih sedikit dari data yang sebenarnya karena angka itu hanya untuk kebutuhan BPS yang memerlukan data keluarga miskin sebagai dasar untuk menyalurkan beras miskin. Sebab dalam realitasnya, jumlah keluarga miskin yang ada di Kecamatan Kota Atambua lebih dari angka itu, didasarkan pada waktu beras miskin tersebut disalurkan. Namun, karena pemerintah mempunyai kuota tertentu, yang jumlahnya tidak mampu menampung seluruh keluarga miskin, sehingga pemerintah Kota Atambua hanya memberikan sebahagian dari seluruh data keluarga miskin yang dimilikinya sesuai dengan kuota tersebut. Pemberian beras miskin melebihi kuota yang terdaftar di BPS merupakan kebijakan pemerintah setempat sebagai antisipasi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari kelompok keluarga miskin yang tidak terdaftar di BPS. Menurut Sekretaris Camat Kota Atambua,³ dengan kebijakan seperti itu, maka seluruh penduduk miskin walaupun tidak terdaftar di BPS memperoleh beras miskin. Kendati beras yang diterima penduduk miskin tidak sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, hal itu tidak menimbulkan gejolak. Artinya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat adalah tepat dan bijaksana. Tidak timbulnya gejolak ataupun tidak adanya penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat dapat diasumsikan bahwa bentuk solidaritas sosial di kalangan keluarga miskin di Kabupaten Belu masih relatif tinggi.

Merujuk pemikiran Gaspersz dan Foeny di atas, yang menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, maka dengan contoh kasus kemiskinan yang berada di Kecamatan Kota Atambua yang merupakan daerah perkotaan di Kabupaten Belu, di mana jumlah kepala keluarga miskinnya 50% dari seluruh jumlah kepala keluarga yang ada, mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin di kecamatan-kecamatan lain persentasenya masih jauh lebih tinggi sebagaimana dicirikan oleh daerah perdesaan akibat semakin tingginya biaya hidup akhir-akhir ini.

IV. PRODUKTIVITAS DAN BUDAYA KERJA

Ketidakmampuan untuk meningkatkan pendapatan dari ekonomi subsisten ke arah yang lebih baik, salah satu alasan yang sering dikemukakan berbagai pihak adalah akibat rendahnya kepemilikan lahan untuk dijadikan sebagai areal pertanian bagi petani, musim kemarau yang begitu panjang sehingga kurang baik untuk kegiatan pertanian, dan keterbatasan modal. Kendati demikian, khususnya dalam bidang pertanian, data tahun 2005 menunjukkan bahwa potensi lahan basah yang belum difungsikan masih relatif luas yaitu sekitar 6.365 hektar dari 19.056 hektar potensi lahan. Sementara potensi lahan kering di Kabupaten Belu lebih luas lagi, yaitu sekitar 99.407 hektar, namun yang belum dimanfaatkan masih sekitar 57.980 hektar (Mau, 2006: 32).

Arti dari angka-angka yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa lahan-lahan terlantar di Kabupaten Belu masih begitu luas di tengah ancaman kerawanan pangan yang terjadi, di mana Kabupaten Belu termasuk salah satu kabupaten yang memiliki beberapa desa beresiko terhadap kerawanan pangan. Padahal, lahan yang belum dimanfaatkan dengan luas yang begitu signifikan, sejatinya dapat ditanami berbagai tanaman palawija, baik oleh pemiliknya sendiri maupun disewakan kepada orang lain untuk dikelola melalui sistem bagi hasil. Apabila lahan-lahan terlantar itu sedemikian rupa, pendapatan ekonomi baik pemilik lahan maupun penyewa dapat meningkat dan kerawanan pangan dapat dihindari, atau paling tidak diminimalisir. Sebab, adanya lahan-lahan terlantar yang begitu luas berimplikasi terhadap rendahnya tingkat produktivitas. Dalam konsep budaya kerja, produktivitas merupakan sesuatu yang diutamakan. Dengan produktivitas, seseorang dipacu untuk tetap bekerja keras, karena seseorang yang bekerja tidak dalam pencapaian produktivitas, ia akan mudah puas pada hasil yang sudah dicapainya, walaupun sejatinya hasil yang ingin dicapai itu masih dapat ditingkatkan. Kondisi seperti ini masih terdapat pada penduduk lokal di Kabupaten Belu, hal itu berakibat tanah-tanah terlantar masih begitu luas dan keinginan untuk merubah pola pertanian belum dilaksanakan.

Menyoroti perilaku kerja dengan mengamati waktu berangkat ke sawah atau ladang pun sebenarnya sudah kelihatan akan perilaku kerja para petani di Kabupaten Belu. Penduduk lokal rata-rata berangkat ke lahan pertaniannya ketika matahari sudah merangkak naik, yaitu sekitar pukul 8 pagi ke atas. Mengingat penduduk lokal saling mengenal satu sama lain, dan tidak sedikit yang masih berkerabat mengakibatkan perjalanan menuju ladang sering terhenti di tengah jalan. Petani sering diajak mampir di rumah kerabat yang dilalui ketika dalam perjalanan menuju lahan pertaniannya, atau perjalanan terhenti untuk mendiskusikan berbagai hal dengan orang yang menegurnya. Akibatnya, waktu tiba di lahan pertanian pun semakin siang, dan kondisi itu sekaligus mengurangi waktu beraktivitas di lahan pertanian. Kalau yang dibicarakan itu adalah masalah adat, ada kemungkinan yang bersangkutan tidak jadi berangkat ke sawah atau ladang mengingat waktu yang dibutuhkan untuk membicarakan persoalan adat begitu lama. Dengan kendala-kendala yang ada di sepanjang perjalanan mengakibatkan waktu yang digunakan untuk mengerjakan lahan pertanian menjadi singkat, sehingga lahan yang dapat dikerjakan pun tentu tidak begitu luas, dan hal itu berdampak pada rendahnya produktivitas petani.

Kondisi cuaca pun mempengaruhi etos kerja terutama pada bidang pertanian. Petani saat ini banyak yang mulai enggan turun ke lahan pertanian untuk menanam tanaman seperti kacang hijau. Akhir-akhir ini, perubahan cuaca yang tidak menentu dari tahun-tahun sebelumnya sering terjadi. Cuaca yang tidak dapat diprediksi itu mengakibatkan masa tanam menjadi berubah. Walaupun perubahan cuaca sudah diketahui, namun karena masa tanam masih dilaksanakan seperti pengalaman masa lalu, mengakibatkan hasil yang diperoleh pun jauh dari yang diharapkan. Akibat dari itu, petani sering mengalami kerugian dari kegiatan pertanian. Musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang tidak menentu ini telah menunda masa tanam di lahan basah pada tahun 2005 di Kecamatan Malaka Tengah, sedangkan untuk lahan kering mengalami penurunan produksi (Leto, 2005).

Kondisi cuaca yang berubah diterima petani hanya dengan pasrah. Mereka tidak menyiasatinya dengan memunculkan kreativitas baru di bidang pertanian. Justru yang terjadi

adalah berserah dan tidak meneruskan aktivitas di bidang pertanian itu. Dalam hal ini, kestabilan curah hujan sangat berpengaruh terhadap aktifitas pertanian. Petani tidak mau mengambil resiko dari ketidakstabilan curah hujan itu dengan tetap meneruskan masa tanam. Sebab, apabila masa ketidakstabilan curah hujan itu terus berlangsung maka petani akan mengalami kerugian, bahkan hal itu dapat mengganggu kelangsungan hidup karena mereka tidak mempunyai sumber pendapatan lain. Sementara kalau curah hujan kembali stabil, petani tidak kehilangan apa-apa kecuali masa panen yang tertunda, dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengolah tanahnya.

V. FAKTOR PENGHAMBAT UNTUK BERKEMBANG

Pada dasarnya, setiap insan di bumi ini menginginkan agar ia dapat hidup lebih baik dari yang sebelumnya. Akan tetapi, banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara untuk dapat hidup lebih baik itu. Hal itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan nilai-nilai kebudayaan yang dimilikinya. Nilai-nilai yang ada dalam kebudayaannya itu berperan penting dalam membentuk pola pikir dan mentalitas komunitas pemilik kebudayaan itu, walaupun sebenarnya teori ini sudah dikritik oleh para ahli antropologi, sebab dalam kenyataannya, anggota masyarakat terdiri atas individu-individu dengan segala variannya. Nilai-nilai budaya sebagai unsur-unsur budaya yang relatif abstrak dan bersifat membimbing tidak selamanya menjadi penuntun perilaku individu-individu yang memiliki nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka (Ahimsa-putra, 2003: 394). Namun bagi kelompok masyarakat yang homogen secara kebudayaan, teori itu masih relevan digunakan karena varian itu belum begitu signifikan untuk mengemukakan bahwa nilai-nilai kebudayaannya tidak lagi berperan penting membentuk pola pikir dan mentalitasnya. Sebab, anggota masyarakat lain dengan nilai kebudayaan yang sama itu dapat menjadi pengawas terhadap sesama anggotanya apakah pola pikir dan mentalitas yang diperankan oleh anggotanya dalam komunitas yang sama itu sesuai atau tidak dengan nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan yang mereka miliki.

Pada masyarakat yang bermukim di Kabupaten Belu, pelaksanaan kegiatan produktivitas yang dilakukan masyarakat, banyak yang tidak berorientasi pada upaya meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Orientasi dari aktivitas pertanian ladang/kebun umumnya dilakukan masih dalam rangka pemenuhan kebutuhan subsisten, dan tidak berorientasi pasar. Sementara investasi mereka diwujudkan dalam bentuk usaha peternakan (ekstensif dengan cara penggembalaan). Pola penggunaan lahan seperti itu mencerminkan pola budaya nafkah agro-pastoral. Dalam budaya nafkah agro-pastoral, umumnya mereka menyandarkan sumber nafkahnya pada aktivitas ladang/kebun dan beternak. Bagi sebagian besar penduduk, ternak merupakan salah satu bentuk investasi sosial. Kepemilikan ternak (terutama ternak sapi dan kuda) mencerminkan status sosial suatu keluarga. Tidak berbeda dengan temuan Adiyoga dan Herawati (2003) di Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang, di Kabupaten Belu pun ternak tersebut umumnya digunakan sebagai *mas kawin* (*belis* menurut istilah setempat) dan upacara-upacara adat lainnya.

Orientasi pasar dalam proses produksi belum dimanfaatkan secara maksimal. Pasar hanya dilihat sebagai penyedia barang dari kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri itu, sebagian kecil dari hasil produksinya dijual ke pasar guna memperoleh uang yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan lain. Kalau tidak, mereka menjual jasa ke pemilik modal dengan upah yang relatif murah agar mereka memperoleh uang guna membeli kebutuhan lain yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Padahal, mereka sebenarnya mempunyai sumber daya ekonomi yang dapat dikelola agar memberikan nilai tambah terhadap ekonomi keluarga. Kendati pihak-pihak terkait sudah berupaya untuk menerapkan pola baru dalam usaha produksi pertanian misalnya, dengan maksud agar hasil yang diperoleh petani dapat meningkat, namun dalam kenyataannya, petani hanya berhenti pada pola lama yang sudah mereka terapkan bertahun-tahun. Artinya, petani hanya puas pada kondisi yang lama itu, akibatnya produktivitas yang diperoleh pun berhenti pada hasil seperti pada pola lama, bahkan cenderung menurun sebagai dampak perubahan iklim dan

tingkat kesuburan tanah yang semakin berkurang.

Penyebab proses produksi yang dilakukan petani berhenti hanya di pola pertanian lama karena petani ketika melakukan proses produksi tidak mempunyai target tertentu yang ingin dicapai. Tidak adanya target yang ingin dicapai tentu karena mereka hidup sekedar untuk mencapai ekonomi subsisten itu tadi. Oleh karena itu, mereka tidak tertantang dalam proses produksi untuk dapat meningkatkan produksinya, sebab usaha dari pola lama itu tidak banyak diharapkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Akibat selanjutnya, petani pun sulit untuk melepaskan diri dari kemiskinan karena yang diperoleh hanya sebatas untuk kebutuhan sehari-hari bahkan cenderung tidak cukup. Perilaku yang demikian inilah yang menegaskan mereka selaku petani subsisten. Sebab, dengan pola lama tingkat produksi yang akan mereka dapatkan sudah diketahui dengan jelas sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Dalam hal ini, petani lebih mengutamakan soal-soal subsistensi daripada keuntungan, sama seperti yang ditemukan oleh Michael Moerman (1968) yang dikutip oleh Scott (1994: 34) tentang pertanian perdesaan di sebuah desa di Muangthai Utara.

Selain itu, pola tanam yang selalu bersama-sama dengan melihat harga komoditi yang tertinggi pada waktu itu. Misalnya, pada bulan Maret harga kentang tinggi, maka petani berlomba-lomba menanam kentang pada saat itu dengan asumsi bahwa harga kentang masih tetap tinggi pada tiga bulan yang akan datang ketika panen kentang tiba. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, di mana ketika panen raya tiba, ternyata harga kentang turun pada tingkat yang paling rendah. Hal itu terjadi karena petani yang menanam kentang jumlahnya begitu banyak, mengakibatkan jumlah kentang yang dipanen pun berlimpah yang berakibat jumlah kentang yang ditawarkan ke pasar pun menjadi berlimpah pula. Sesuai dengan hukum ekonomi, semakin sedikit barang yang ditawarkan di pasar harganya akan semakin tinggi, sebaliknya semakin banyak barang yang ditawarkan harganya pun akan semakin rendah. Kondisi ini membuat petani yang pada waktu itu menanam kentang menjadi kecewa, yang berarti masa tanam berikutnya mereka enggan untuk menanam kentang. Ketika hal itu terjadi, jumlah kentang yang ditawarkan hanya sedikit

sehingga harganya kembali tinggi. Hukum ekonomi yang demikian itu tidak dipahami oleh petani sehingga yang diinginkan adalah menikmati harga jual yang tinggi ketika waktu menjual komoditi itu sudah tiba walaupun jumlah komoditi yang ditawarkan di pasar berlimpah.

Tidak berhenti hanya di situ saja. Petani-petani di Kabupaten Belu dalam melakukan aktivitas pertaniannya pun sering tidak merawat tanaman yang sudah ditanam agar bertumbuh dengan baik sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Ketika musim kemarau tiba, petani bersemangat untuk membersihkan lahan yang akan ditanami. Semak-semak yang tumbuh di lahannya direbas dan dibakar. Begitu hujan turun, petani pun menanam lahan pertaniannya. Namun setelah itu, tanaman tersebut dibiarkan tumbuh sendiri tanpa ada usaha untuk memeliharanya. Tanaman baru dilihat kembali begitu panen tiba, sehingga kondisi sebenarnya dari tanaman yang ditanam tidak diketahui oleh petani.

Selain itu, kendati masyarakat di Kabupaten Belu, misalnya dengan bermukimnya berbagai suku lain di wilayah Indonesia termasuk warga baru dari eks Provinsi Timor Timur (sekarang Negara Republik Demokratik Timor Leste), merupakan masyarakat terbuka dan menyambut baik setiap kehadiran pendatang, namun tidak serta merta perubahan begitu mudah diterima. Menurut Eric Wolf yang dikutip oleh Cancian (1989: 129), masyarakat terbuka (*open communities*) adalah masyarakat yang biasanya mempunyai masalah ekonomi, politik, dan kultural yang terhubung dengan masyarakat luas. Pengaruh dari dunia luar secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kebalikan dari masyarakat terbuka adalah masyarakat tertutup. Masyarakat tertutup dicirikan oleh kecenderungan memproduksi biji-bijian untuk dimakan sendiri daripada hasil pertanian untuk diperdagangkan, dan masyarakatnya sering mempunyai kultural, sejarah, dan politik yang membedakannya dengan masyarakat yang lebih luas.

Namun dalam menerima perubahan, tidak seluruh sendi-sendi kehidupan ikut berubah kendati mereka itu dapat disebut sebagai masyarakat terbuka. Salah satu segi yang sulit untuk dirubah adalah pola pertanian. Suatu

waktu, pemilik modal Markus (bukan nama sebenarnya, 52 tahun)⁴ mencoba menerapkan teknologi baru di bidang pertanian di lahan miliknya. Pekerjaan tersebut tidak dilakukannya sendiri, ia hanya memberi instruksi kepada petani-petani yang ia upah untuk melakukan pekerjaan itu. Melibatkan petani dalam pekerjaan ini dimaksudkan agar setelah pekerjaan itu selesai dan hasilnya diketahui lebih banyak daripada pola pertanian lama, petani bersedia untuk menerapkan teknologi itu di lahannya sendiri. Setelah semuanya selesai dan petani mengerti untuk melaksanakan pola baru itu, ternyata petani tidak pernah mengimplementasikan pengetahuan baru itu di lahan pertaniannya sendiri. Pola lama masih tetap dilakukan walaupun hasilnya jauh di bawah pola baru itu.

Petani tidak melaksanakan pola tanam baru, ada beberapa alasan. *Pertama*, petani takut mengalami kegagalan dalam penerapan pola baru itu, yang berakibat terjadinya kerugian. Sebagai petani subsisten, kerugian adalah ancaman bagi kelangsungan hidupnya. Sumber nafkah yang diandalkan untuk menghidupi keluarganya hanya berasal dari sektor pertanian, sementara kalau mereka bekerja di lahan orang lain, tentu mereka tidak takut gagal karena mereka hanya tenaga upahan. Adapun pihak yang mengalami kerugian dari implementasi teknologi baru itu ada pada orang yang mengupahnya atau pemilik lahan. *Kedua*, penguasaan teknologi belum dipahami petani sepenuhnya. Mengharapkan pendampingan dari tenaga PPL sangat kecil karena jumlah PPL yang tidak banyak dan cakupan wilayah kerja dari seorang tenaga PPL relatif luas. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa Tenaga PPL untuk seluruh Kabupaten Belu jumlahnya hanya 63 orang (Mau, 2006: 33-36), padahal idealnya tenaga penyuluh bertanggung jawab atas satu desa agar hasil yang diperoleh optimal. Karena itu jumlah tenaga penyuluh jauh dari jumlah ideal. *Ketiga*, untuk menerapkan pengetahuan baru itu diperlukan ongkos produksi yang tidak sedikit. Padahal, petani lebih banyak hidup dengan cara subsisten sehingga mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu untuk menerapkan pengetahuan baru itu merupakan hal yang memberatkan. Revolusi hijau di bidang pertanian yang pernah didengungkan oleh pemerintah tahun 70'an, misalnya, juga tidak membuat petani bertambah sejahtera,

sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh FAO, yang menyatakan bahwa revolusi hijau telah mengajarkan kepada petani bagaimana pentingnya inovasi teknologi-benih unggul, pupuk, pestisida, dan mekanisasi pertanian yang berhasil memberikan keuntungan yang luar biasa bagi si miskin melalui peningkatan efisiensi usaha tani, pendapatan yang meningkat, dan harga pangan yang rendah (Santosa, 2004). Dalam kenyataannya, peningkatan produktivitas, standar kehidupan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akibat revolusi hijau tidak mengangkat jutaan orang petani dari belitan kemiskinan. Justru revolusi hijau telah membawa tingginya biaya produksi di bidang pertanian, karena revolusi hijau itu membutuhkan biaya yang lebih tinggi, seperti menyediakan bibit yang unggul, pestisida dan inovasi teknologi lainnya di bidang pertanian itu sendiri, sebaliknya harga jual produksi dari revolusi hijau itu justru turun.

VI. KESIMPULAN

Penduduk Kabupaten Belu yang hidup dalam belunggu kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor. Namun penyebab yang paling mendasar adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah itu akibat kemampuan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sangat terbatas. Sebab, melalui pendidikan pola pikir seseorang dapat dirubah sehingga dapat membuat seseorang lebih kreatif dan berdaya pikir tinggi. Dengan pendidikan pula, keterbatasan-keterbatasan yang ada di daerahnya dapat disiasati, sehingga keterbatasan tidak dilihat hanya sebagai kendala ataupun masalah, namun hal itu dapat dirubah menjadi peluang guna meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

Keterbatasan pendidikan juga menjadi penyebab masyarakat hidup dalam ekonomi subsisten. Sebab, keterbatasan itu membuat

seseorang kurang mampu berpikir jauh ke depan, termasuk untuk membuat target-target tertentu yang akan dicapai dalam melaksanakan proses produksi. Artinya, proses produksi yang dilakukan tidak hanya rutinitas belaka tetapi menggagas hal-hal yang lebih besar dari sekedar rutinitas dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Pendidikan yang lebih baik tidak saja melalui sekolah-sekolah formal, tetapi yang lebih esensial dari pendidikan itu adalah terjadinya transfer pengetahuan, dan pengetahuan itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mentransfer pengetahuan itu adalah dengan seringnya melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh para fasilitator. Dengan banyak melihat dan mendapatkan informasi dari ahlinya, perubahan pengetahuan yang kemudian diikuti pada tingkat implementasinya pasti terjadi. Sebab pada dasarnya, semua insan di dunia ini ingin berubah apalagi hal itu untuk kebaikan dan peningkatan kesejahteraannya. Hanya saja, manusia itu terkadang tidak tahu bagaimana cara merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik sehingga yang terjadi adalah kehidupan yang monoton. Namun, karena penduduk dengan sumber daya manusia yang rendah itu relatif lambat untuk menerima transfer pengetahuan dari yang memberikan pengetahuan itu, maka yang diperlukan adalah kesabaran untuk memberikan pelatihan. Harus diingat bahwa yang dirubah tidak saja pengetahuan tetapi mentalitas yang sudah mengakar dengan pola-pola lama yang mereka yakini lebih baik dari yang lain, apalagi terhadap pola yang baru mereka kenal. Oleh karena itu, pendampingan yang terus menerus sampai pola pikir masyarakat berubah harus dilakukan, tidak seperti sekarang ini, di mana pendampingan dari kalangan penyuluh kurang optimal sehingga hasilnya pun tidak kelihatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoga, IDBM dan Erni Herawati, 2003. "Pola Nafkah Lokal, Acuan Mengkaji Kemiskinan di Era Otonomi Daerah: Kasus Porpinsi Nusa Tenggara Timur", dalam Jurnal Ekonomi Rakyat, Th.I-No.12-Februari 2003 (<http://www.ekomirakyat.org>).
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri, 2003. "Epilog: Wirausaha, Industri Kecil dan Antropologi", dalam Ahimsa-Putra (Penyunting), *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa*. Yogyakarta: Kepel Press. Hlm. 389-434.

- BPS, 2006. *Belu dalam Angka 2006*. Atambua: BPS Kabupaten Belu.
- BPS, 2007. *Belu dalam Angka 2007*. Atambua: BPS Kabupaten Belu.
- Cancian, Frank, 1984. "Risk and Uncertainty in Agricultural Decision Making" dalam P.F. Barlett (editor), *Agricultural Decision Making: Anthropological Contributions to Rural Development*. Berkeley: Academic Press, Inc.
- Cancian, Frank, 1989. "Economic Behavior in Peasant Communities", dalam S. Platner (editor), *Economic Anthropology*. Stanford, California: Stanford University Press. Hal. 127-170.
- Haba, John (editor) 2007. *Potret Desa-Desa perbatasan di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur: Kajian Sosial Ekonomi di Tiga Wilayah Kecamatan*. Jakarta: LIPI Press.
- Gaspersz, Vincent dan Esthon Foenay, 2003. "Kinerja Pendapatan Ekonomi rakyat dan Produktivitas Tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur", dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Website: www.ekonomirakyat.org. Artikel - Th. II - No. 8 - Nopember 2003.
- Leto, Silvester, 2005, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2005*. Betun: Pemerintah Kabupaten Belu, Kecamatan Malaka Tengah.
- Mau, Servasius Boko H., 2006. *Evaluasi Lima Pilar Pembangunan Kabupaten Belu*. Atambua: Bappeda Kab. Belu.
- Roger, Everett M., 1968. "The Subculture of Peasantry" dalam Clifton R. Wharton, Jr (editor), *Subsistence Agriculture and Economic Development*. Honolulu: University of Hawaii, East-West Center Press.
- Santosa, Dwi Andreas, 2004. "Bioteknologi Pertanian, Harapan bagi Si Miskin". Dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/04/ilpeng/1183488.htm>, 24 Agustus. (Diunduh tanggal 14 Oktober 2005).
- Scott, James C., 1976. *Moral Ekonomi Petani* (terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Siburian, Robert (editor) 2007. *Budaya Korporat dan Upaya Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Belu*. Laporan Penelitian Kompetitif LIPI (Tidak Diterbitkan).

Catatan Kaki :

- ¹ Tulisan ini didasarkan kepada data hasil studi literatur dan wawancara dengan informan pada waktu penulis melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Budaya Korporat dan Upaya Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Belu", yang didanai oleh LIPI, khususnya dalam kegiatan Riset Kompetitif Bidang Wilayah Perbatasan tahun 2006 dan 2007. Kepada Dr John Haba yang menjadi rekan saya dalam penelitian tersebut disampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama ini.
- ² Sektor-sektor lain itu adalah Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Bangunan; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.
- ³ Wawancara dilakukan di Kantor Camat Atambua, Juni 2007.
- ⁴ Wawancara dilakukan bulan Juni 2007.

BIODATA PENULIS:

Robert Siburian, adalah Peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, Jakarta. S2 bidang Antropologi diselesaikan di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tahun 2004. Tesis yang ditulisnya berjudul: "Dalihan na Tolu dan Kegiatan Ekonomi: Studi Kasus pada Orang Batak Toba di Porsea." Lima tahun belakangan, beliau aktif melakukan kegiatan penelitian pada isu masyarakat perbatasan di Kabupaten Belu dan kawasan konservasi terutama taman nasional.